RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DARAH (RLPPD) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Adapun capaian kinerja makro Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1 (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Tahun N (Tahun 2024)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,76	73,33	0,80
2	Angka Kemiskinan	5,84	5,81	-0,03
3	Angka Pengangguran	3,26	3,20	-0,06
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,11	4,95	0,84
5	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	32,28	34,85	2,57
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) *)	0,225	0,225*	0*

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024
Keterangan :

*) : Angka Sementara (mengikuti tahun sebelumnya)

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan Pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

NO	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N
1.	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\textbf{\textit{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}}{\textbf{\textit{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun pada}} \text{ kabupaten } \textbf{\textit{yang bersangkutan}}} \times 100\%$ 7711x100% = 92,54% 8333	$\frac{\textbf{\textit{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}}{\textbf{\textit{Jumlah anak usia 5 – 6 tahun pada}} \text{ kabupaten } \textbf{\textit{yang bersangkutan}}} \times 100\%$ 6152x100% = 75% 8203

	2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	***Jumlah anak usia 7 – 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar*** x 100% ***Jumlah anak usia 7 – 12 tahun pada*** kabupaten ***yang bersangkutan*** 25224x100% = 95,70% 26358	***Jumlah anak usia 7 – 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar*** x 100% ***Jumlah anak usia 7 – 12 tahun pada*** kabupaten ***yang bersangkutan*** 21278x100% = 81% 26175
	3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	***Jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama*** x 100% ***Jumlah anak usia 13 – 15 tahun pada*** kabupaten ***yang bersangkutan*** 11091x100% = 81,04% 13686	***Jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama*** x 100% ***Jumlah anak usia 13 – 15 tahun pada*** kabupaten ***yang bersangkutan*** 13301x100% = 98% 13613
	4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	***Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan*** x 100% ***Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada*** kabupaten ***yang bersangkutan*** 918x100% = 24,62% 3729	***Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan*** x 100% ***Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada*** kabupaten ***yang bersangkutan*** 9863x100% = 19% 52958

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi Belanja Urusan Pendidikan di kabupatern Hulu Sungai Tengah tahun 2024 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	59.199.789.970	34.151.372.6493	60,77
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	32.942.417.200	26.662.315.242	80,94
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	14.894.998.400	9.479.075.3616	63,64
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.536.390.800	16.290.535.788	79,33
5	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0	0	
6	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	282.463.350	247.470.700	87,61

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Permasalahan Eksternal:

a) Kurangnya Dukungan Pemerintah Pusat

- *Permasalahan*:

  Pemotongan anggaran atau kebijakan yang tidak mendukung penuh implementasi SPM pendidikan di tingkat daerah.

- *Solusi*:

  Pihak daerah perlu berkomunikasi secara efektif dengan pemerintah pusat untuk memastikan adanya dukungan dan alokasi anggaran yang memadai.

b) Tingkat Kemiskinan dan Ketidaksetaraan Sosial

- *Permasalahan*:

  Masyarakat yang miskin memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan berkualitas.

- *Solusi*:

  Program beasiswa, bantuan pendidikan, dan pengentasan kemiskinan dapat membantu meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

2) Permasalahan Internal :

a) Kurangnya Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia):

- *Permasalahan*

  Guru dan tenaga pendidik kurang berkualitas atau minim keterampilan dalam menerapkan SPM.

- *Solusi*

  Pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan guru dapat meningkatkan kualitas SDM.Tingkat Kemiskinan dan Ketidaksetaraan Sosial:

b) Infrastruktur Pendidikan yang Kurang Memadai:

- *Permasalahan*:

  Sekolah yang tidak memadai fasilitas dan sarana pembelajaran.

- *Solusi*:

  Perlu investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan, termasuk pengadaan buku dan perangkat pembelajaran.

c) Kurangnya Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat

- *Permasalahan*:

  Rendahnya partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan anak-anak.

- *Solusi*:

  Program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan melalui kampanye sosialisasi dan kegiatan partisipatif.

2. Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1	CAPAIAN KINERJA TAHUN N
2.	1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\textbf{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten/kota}}{\textbf{Jumlah Penduduk di kabupaten/kota}}$ $\frac{323}{263.061}$ = 1,2278521 %	$\frac{\textbf{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten/kota}}{\textbf{Jumlah Penduduk di kabupaten/kota}}$ $\frac{323}{263.599}$ = 1,19 %
	2. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{\textbf{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\textbf{Jumlah RS di kabupaten/kota}}$ x 100% $\frac{1}{1}$ x100% = 100 %	$\frac{\textbf{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\textbf{Jumlah RS di kabupaten/kota}}$ x 100% $\frac{1}{1}$ x100% = 100 %
	3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\textbf{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\textbf{Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota}}$ x 100%	$\frac{\textbf{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\textbf{Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota}}$ x 100%

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1	CAPAIAN KINERJA TAHUN N
		3339 x 100% = 78,6943201 % 4243	3155 x 100% = 65,94 % 4785
	4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	***Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan*** x 100% ***Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota*** 3520 x 100% = 86,9135802 % 4050	***Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan*** x 100% ***Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota*** 3172 x 100% = 66,29 % 4785
	5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	***Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar*** x 100% ***Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota*** 3398 x 100% = 88,0995592 % 3857	***Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar*** x 100% ***Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota*** 3123 x 100% = 69,54 % 4491
	6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	***Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar*** x 100% ***Jumlah balita di kabupaten/kota*** 18449 x 100% = 95,9585977 % 19226	***Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar*** x 100% ***Jumlah balita di kabupaten/kota*** 20787 x 100% = 94,59 % 21975
	7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	***Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar*** x 100% ***Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota*** 34191 x 100% = 96,0205572 % 35608	***Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar*** x 100% ***Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota*** 34611 x 100% = 97,20 % 35608
	8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	***Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar*** x 100% ***Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota*** 146752x100% = 88,0642335 % 166642	***Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar*** x 100% ***Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota*** 202511 x100% = 118,80 % 170461
	9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	***Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar*** x 100% ***Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota*** 30408 x 100% = 73,387233 % 41435	***Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar*** x 100% ***Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota*** 31456 x 100% = 98,52 % 31927

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1	CAPAIAN KINERJA TAHUN N
	10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	***Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*** x 100% ***Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota*** 85822.x100% = 79,3333272 % 108179	***Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*** x 100% ***Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota*** 13903.x100% = 68,08 % 20421
	11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	***Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*** x 100% ***Jumlah penderita DM di kabupaten/kota*** 3213 .x100% = 148,4750462 % 2164	***Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*** x 100% ***Jumlah penderita DM di kabupaten/kota*** 3104 .x100% = 147,45 % 2105
	12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	***Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*** x 100% ***Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota*** 519 .x100% = 134,8051948 % 385	***Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*** x 100% ***Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota*** 489 .x100% = 130,05 % 376
	13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	***Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar***x 100% ***Jumlah penderita TBC di kabupaten/ kota*** 3146 x100% = 62,7818799 % 5011	***Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar***x 100% ***Jumlah penderita TBC di kabupaten/ kota*** 4421 x100% = 77,62 % 5695
	14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	***Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar*** x 100% ***Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota*** 8699 x100% = 143,6663914 % 6055	***Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar*** x 100% ***Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota*** 7337 x100% = 129, 14 % 5681

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi Belanja Urusan Kesehatan di kabupatern Hulu Sungai Tengah tahun 2024 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pengelolaan Pelayanan kesehatan ibu hamil	2.028.798.600	784.613.235	38,67
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.	960.460.000	177.987.823	18,53
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	315.136.200	59.419.040	18,86
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita.	292.206.100	199.361.666	68,23
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.	547.178.000	365.652.000	66,83
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif.	495.930.900	73.924.628	14,91
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut.	82.065.200	34.552.150	42,10
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.	140.000.000	74.061.504	52,90
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.	131.970.000	85.183.124	64,55
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat.	217.656.900	25.867.000	11,88
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.	337.315.000	140.116.000	41,54
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.	96.548.000	36.454.684	37,76

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Pelayanan kesehatan ibu hamil

- **Hambatan**

a) Masih ada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya pada trimester I.

b) Masih adanya ibu hamil yang abortus/keguguran.

c) Masih ada dokter di puskesmas yang belum mengikuti pelatihan penggunaan alat USG.

d) Faktor sosial budaya masyarakat. akses/geografis.

e) Sebagian akses/geografis menuju fasyankes masih sulit

- **Solusi**

a) Memperbanyak edukasi persiapan layak hamil bagi calon pengantin.

b) Penguatan motivasi/ bimbingan untuk ibu hamil secara personal atau melalui media social (whatsapp).

c) Sosialisasi kepada LS/tokoh agama/tokoh masyarakat tentang pentingnya Ibu Hamil memeriksakan diri selama kehamilan ke Fasilitas Kesehatan dan P4K.

d) Penyediaan peralatan dan logistik untuk reagen/stik pemeriksaan laboratorium.

2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin

- **Hambatan**

a) Pada kondisi darurat masih ada ibu melahirkan di non fasyankes
b) Masih adanya persalinan yang meninggal pada pasca salin
c) Masih adanya persalinan dengan dukun kampung
d) Faktor sosial budaya masyarakat. akses/geografis.

- **Solusi**

a) Peningkatan sosialisasi tentang P4K
b) Perlunya pelatihan/ peningkatan kapasitas/ kompetensi petugas tentang pemberian pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar
c) Melaksanakan pembinaan dukun kampung untuk melaksanakan persalinan di fasyankes.
d) Mendekatkan pelayanan pada masyarakat.Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

3) Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir.

- **Hambatan**

a) Masih ada ibu melahirkan di non fasyankes sehingga bayi tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar.
b) Masih ada orang tua/keluarga yang menolak pemeriksaan skrining hipotyroid kongenetal.
c) Faktor sosial budaya masyarkat yang lebih mengutamakan pengobatan tradisional.

- **Solusi**

a) Kunjungan rumah oleh petugas lebih ditingkatkan
b) Peningkatan kualitas pembelajaran melalui kelas ibu melahirkan dan konseling gizi untuk mencegah bayi BBLR.
c) Edukasi/Penyuluhan tentang kesehatan bayi baru lahir lebih ditingkatkan

4) Pelayanan kesehatan balita (usia 0-59 bulan)

- **Hambatan**

a) Masih ada Balita Yang tidak berkunjung/ memanfaatkan posyandu
b) Faktor kesibukan/pekerjaan ortu. serta jarak/akses

- **Solusi**

a) Meningkatkan upaya promotif dan edukatif dengan pembuatan media seperti buku atau selebaran serta cara penyampaian informasi oleh masing-masing Puskesmas untuk disebarluaskan ke wilayah kerjanya terkait perawatan balita.
b) Perlu terus advokasi ke lintas sektor sosialisasi pentingnya balita ke Posyandu secara rutin setiap bulan.

5) Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar (jumlah semua Anak usia Pendidikan

Dasar)

- **Hambatan**

a) Masih ada siswa yang tidak berhadir ke sekolah pada saat penjaringan.

b) Ada sekolah yang tidak ada pengelola UKSnya.

- **Solusi**

a) Melakukan kerjasama dengan pihak sekolah untuk melakukan rujukan bagi siswa yang tidak hadir.

b) Melakukan kerjasama dengan pihak sekolah (Kepala Sekolah) dalam hal pelaksanaan UKS di Sekolah.

6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif (usia 15-59 tahun)

- **Hal yang ingin ditingkatkan**

a) Penambahan jumlah Posbindu ke desa - desa sehingga masyarakat mendapatkan akses / jangkauan pelayanan kesehatan Usia Produktif menjadi lebih dekat.

b) Meningkatkan promosi kesehatan tentang perlunya pemeriksaan kesehatan diri.

7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih)

- **Hambatan**

a) Masih banyak lansia tidak datang saat pelayanan posyandu lansia.

- **Solusi**

a) Dilaksanakannya kegiatan pelayanan dengan kunjungan rumah terutama pada lansia risti (usia >70 tahun dan lansia dengan penyakit kronis/berat)

b) Pelaksanaan Posyandu Lansia secara dinamis per RT.

8) Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi (jumlah estimasi penderita Hipertensi usia ≥ 15 tahun)

- **Hambatan**

a) Kurangnya kunjungan khususnya usia 15 - 59 tahun.

b) Kurangnya jumlah Posbindu di desa-desa.

c) Masih kurangnya Promosi kesehatan tentang Hipertensi ke masyarakat.

- **Hal yang ingin ditingkatkan**

a) Pelatihan SDM pengelola program PTM Puskesmas.

b) Meningkatkan penyuluhan kesehatan terhadap penderita hipertensi.

9) Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (jumlah estimasi penderita Diabetes Melitus usia ≥ 15 tahun)

- **Hal yang ingin ditingkatkan**

a) Pelatihan SDM pengelola program PTM Puskesmas.

b) Pengadaan logistik program PTM (Posbindu kit. RDT dan reagent).

c) Meningkatkan penyuluhan kesehatan terhadap penderita diabetes melitus.

10) Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)

- **Hal yang ingin ditingkatkan**

a) Petugas kesehatan melakukan kunjungan rumah orang dengan gangguan jiwa berat.
b) ODGJ berat yang mengalami pemasungan, perlu ada koordinasi yang inten dengan pihak dinas terkait, misal Aparat desa, Kecamatan dan Dinas Sosial Kabupaten

11) Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (Jumlah orang yang terduga TB)

- **Hambatan**

a) Penemuan kasus masih pasif dan investigasi kontak belum berjalan optimal.
b) Petugas pengelola program TB di Puskesmas masih banyak yang merangkap jabatan.
c) Belum optimalnya pelaksanaan PIS-PK, khususnya kegiatan intervensi dari hasil pendataan PIS-PK tersebut.

- **Solusi**

a) Penjaringan terduga dan penemuan kasus harus dilakukan secara aktif.
b) Mengoptimalkan kegiatan investigasi kontak dengan melibatkan kader kesehatan di desa dalam kegiatan tersebut.
c) Melakukan penyuluhan kesehatan perihal Tuberkulosis ke masyarakat.

12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (jumlah orang dengan risiko berinfeksi virus HIV)

- **Hambatan**

a) Penemuan kasus masih pasif dan investigasi kontak belum berjalan optimal.
b) Pengelola program HIV Puskesmas masih banyak yang merangkap jabatan.

- **Solusi**

a) Penjaringan terduga dan penemuan kasus harus dilakukan secara aktif. penemuan aktif melalui skrining di tempat tempat khusus.
b) Mengoptimalkan kegiatan investigasi kontak.
c) Melakukan penyuluhan kesehatan perihal HIV-AIDS ke masyarakat

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1	CAPAIAN KINERJA TAHUN N
3.	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	***Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)*** x 100% ***Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)*** 1.197.x100% = 2.26 % 52.891	***Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)*** x 100% ***Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)*** 1.197.x100% = 2.26 % 52.891
	2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	***Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)*** x 100% ***Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)*** 0 x 100% = 0% 0	***Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)*** x 100% ***Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)*** 0 x 100% = 0% 0
	3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	***Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha),direhabilitasi (ha),dioperasi dan pelihara (ha)*** x 100% ***luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota*** 9.545 x100% = 68.28 % 13.979	***Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha),direhabilitasi (ha),dioperasi dan pelihara (ha)*** x 100% ***luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota*** 9.580 x100% = 68.53 % 13.979
	4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	***Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi didalam sebuah kabupaten/kota*** x 100% ***Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kabupaten/kota tersebut*** 68.156 x100% =81,50% 83.625	***Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi didalam sebuah kabupaten/kota*** x 100% ***Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kabupaten/kota tersebut*** 68.662 x100% =82,11% 83.625

	5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	***Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah diPLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD*** x 100% ***Jumlah rumah diKabupaten Kota*** 5.328x100% = 6.37 % 83.635	***Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah diPLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD*** x 100% ***Jumlah rumah diKabupaten Kota*** 5.328x100% = 6.37 % 83.635
	6. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	***Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya*** x 100% ***Jumlah IMB yang berlaku*** 21x100% = 100%. 21	***Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya*** x 100% ***Jumlah IMB yang berlaku*** 24x100% = 100%. 24
	7. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	***Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap*** x 100% ***Panjang jalan keseluruhan diwilayah kabupaten/kota*** 509,97x100% = 70,309 % 725,33	***Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap*** x 100% ***Panjang jalan keseluruhan diwilayah kabupaten/kota*** 50,535x100% = 67,09 % 756,497
	8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	***Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis***x 100% ***Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis diwilayah Kabupaten/Kot***a 89 x 100% = 100 % 89	***Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis***x 100% ***Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis diwilayah Kabupaten/Kot***a 143 x 100% = 26 % 538
	9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	***Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi*** x100% ***Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya*** 0 x 100% = 0 % 91	***Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi*** x100% ***Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya*** 181 x 100% = 100 % 181

B. Realisasi Belanja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di kabupatern Hulu Sungai Tengah tahun 2024 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

SPM	Target	Anggaran	Realisasi	Realisasi Anggaran
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	100%	2.233.739.900,00	47,72%	1.065.869.163,00
Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	100%	8.512.229.700,00	91,46%	7.784.875.422,00

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Permasalahan :

a) –

b) -

2) Solusi :

a) -

4. Urusan Perumahan dan Kawasan permukiman

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan Perumahan dan Kawasan permukiman yang diperoleh oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1	CAPAIAN KINERJA TAHUN N
4.	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	***Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n*** x 100% ***Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n*** 40 x 100% = 100% 40	***Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n*** x 100% ***Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n*** 10 x 100% = 100% 10
	2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	***Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni*** x 100% ***Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan*** 0 x100% = 0% 0	***Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni*** x 100% ***Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan*** 0 x100% = 0% 0
	3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	***Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)*** x 100% ***Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha*** 110,22.x100% = 80,14 % 137,53	***Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)*** x 100% ***Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha*** 211,89.x100% = 70,55 % 300,33
	4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	***Jumlah unit rumah tidak layak huni*** x 100% ***Jumlah total unit rumah kabupaten/kota*** 3775 x100% = 5,18 % 72.849	***Jumlah unit rumah tidak layak huni*** x 100% ***Jumlah total unit rumah kabupaten/kota*** 3440 x100% = 4,66 % 73.845
	5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	***Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU*** x 100% ***Jumlah unit rumah kab/kota*** 46.134 x100% = 63,33 % 72.849	***Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU*** x 100% ***Jumlah unit rumah kab/kota*** 1105 x100% = 1,50 % 73.849

B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan permukiman

Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan permukiman di kabupatern Hulu Sungai Tengah tahun 2024 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PENCAPAIAN
	Program Pengembangan Perumahan			
	Kegiatan :			
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	181.990.600,-	140.802.250,-	
	SubKegiatan :			
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	181.990.600,-	140.802.250,-	77,37%
	Kegiatan :			
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	33.663.700,-	24.747.300,-	
	SubKegiatan :			
1	**Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	24.063.500,-	19.620.000,-	81,54%
2	**Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	9.600.200,-	5.127.300,-	53,41%
	Kegiatan :			
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	268.013.000,-	131.300.000,-	
	SubKegiatan :			
1	**Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator**	268.013.000,-	131.300.000,-	48,99%
Total		**483.667300,-**	**296.849.550,-**	**61,37 %**

C. Permasalahan dan Solusi yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan dan Kawasan permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- **Permasalahan**

  Secara umum permasalahan dihadapi terkait implementasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman antara lain sebagai berikut:

a) Secara anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah mengalokasikan dana untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, guna membantu Rehabilitasi rumah korban bencana alam melalui anggaran bantuan sosial pada kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebanyak 23 unit dengan Kategori rumah rusak berat 5 Unit, rumah rumah rusak sedang 8 Unit, dan rumah rusak ringan 10 Unit untuk membantu korban puting beliung, yang mana rumah korban puting beliung tersebut sudah diperbaiki mandiri oleh warga sehingga untuk realisasi penanganan rencana memakai sistem reimbursement. Akan tetapi regulasi terkait sistem Reimbursement ternyata sudah di hapus di BNPB Pusat, karena tidak ada regulasi sebagai dasar pelaksanaan dan tidak ada nya perubahan Anggaran di Tahun 2024, maka Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak Huni bagi korban bencana hanya bisa melaksanakan 10 unit untuk kategori rumah rusak ringan menggunakan data yang sudah ada SK penetapan kategori tingkat kerusakan kejadian banjir bandang Tahun 2021. Pada Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendapatkan bantuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 20 unit.

b) Terkait bantuan Penyediaan Rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan penyusunan Dokumen Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus (Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong), penyusunan Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah (Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara).

- **Solusi**

Untuk permasalahan di atas, ada beberapa solusi yang disampaikan:

a) Mengoptimalkan koordinasi terkait penanganan korban bencana dengan BPBD agar informasi terkait rumah yang terdampak bencana bisa segera dibantu.
b) Melakukan pendataan daerah-daerah yang rawan bencana untuk mengantisipasi terjadinya dampak yang buruk akibat bencana alam.
c) Menambah anggaran biaya untuk persiapan bantuan rehabilitasi rumah korban bencana
d) Mengusulkan penanganan bantuan rumah bagi korban bencana menggunakan dana APBN, APBD Provinsi, dan alternatif pendanaan lainnya sebagai upaya penanganan rehabilitasi rumah bagi korban bencana.

e) Melakukan koordinasi dengan SOPD teknis terkait yang melakukan Program Pembangunan Infrastruktur yang bisa berdampak pada relokasi rumah warga.

5. Urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
yang diperoleh oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1	CAPAIAN KINERJA TAHUN N
5.	1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	***Jumlah pengaduan yang ditangani*** x 100% ***Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk*** 55.x 100% = 100 % 55	***Jumlah pengaduan yang ditangani*** x 100% ***Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk*** 52.x 100% = 100 % 52
	2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	***Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan*** x 100% ***Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi*** 29 x100% = 8,6053412 % 337	***Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan*** x 100% ***Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi*** 16 x100% = 84,21 % 19
	3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	***Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana* x 100%** ***Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan*** 92.205 x100% =56,86% 162.169	***Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana* x 100%** ***Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan*** 156.425 x100% =80,60% 194.072
	4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	***Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana* x 100%** ***Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana*** 345 x100% = 4,3% 8.031	***Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana* x 100%** ***Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana*** 595 x100% = 0,31 % 194.072

	5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	***Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana* x 100%** ***Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana*** 11.167 x100% = 15,21 % 73.395	***Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana* x 100%** ***Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana*** 160.792 x100% = 100 % 160.792
	6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	***Jumlah layanan pemadaman,penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah*** x 100% ***Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota*** 55 x 100% = 100 % 55	***Jumlah layanan pemadaman,penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah*** x 100% ***Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota*** 43 x 100% = 95,5 % 55
	7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran 15. Menit	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran 15. Menit

B. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi Belanja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di kabupatern Hulu Sungai Tengah tahun 2024 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

SPM	Target	Anggaran	Realisasi	Realisasi anggaran
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Rp. 79.831.400,-	100%	Rp. 53.561.870,-
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Rp. 434.356.200,-	100%	Rp. 299.203.173,-
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	100%	Rp. 1.177.205.000,-	100%	Rp. 1.100.183.484,-

evakuasi korban bencana				
Jumlah data dan informasi kebencanaan	100%	Rp. 315.956.700,-	100%	Rp. 286.842.701,-

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	Permasalahan	Solusi
1.	Masih Kurangnya SDM (Kuantitas dan Kualitas) di BPBD	diharapkan adanya penambahan SDM di BPBD
2.	Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki	diharapkan agar adanya penambahkan Sarana dan Prasarana di BPBD
3.	Belum Optimalnya Sistem pelayanan Informasi Kebencanaan	Pengoptimalan EWS semoga dapat terlaksana
4.	Belum Optimalnya Pengurangan Risiko dan Dampak Bencana	Mengoptimalkan kegiatan Sosialisasi dan keterlibatan Masyarakat dalam Mitigasi Bencana.

6. Urusan Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian Kinerja urusan Sosial
yang diperoleh oleh Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja kunci yang digunakan adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA TAHUN N-1	CAPAIAN KINERJA TAHUN N
4.	1. Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	***Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang tepenuhi kebutuhan dasanya di luar panti*** x 100% ***Populasi penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis*** 1.549 x 100% = 86,0555556% 1.800	***Jumlah korban penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang tepenuhi kebutuhan di luar panti*** x 100% ***Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis*** 2.113x100% = 98,05% 2.155
	2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	***Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran*** x 100% ***Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana derah kabupaten kota*** 131 x100% = 100% 131	***Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran*** x 100% ***Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana derah kabupaten/kota*** 74.x100% = 100% 74

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi Belanja Urusan Sosial di kabupatern Hulu Sungai Tengah tahun 2024 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1	**APBD**	14.317.417.900
3	**APBN**	
	RST	
	PENERIMA PENA REGULER HST	
	PENERIMA PENA BERDIKARI HST	
	PKH	
Jumlah		14.317.417.900

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Permasalahan	**Solusi**	**Recana Tindak lanjut**
- Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat tertangani.	- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dan instansi terkait dalam penanganan PPKS	

- Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PPKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal	- Meningkatkan kualitas hidup PPKS melalui peran aktif keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. - Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana operasional dalam pelayanan PPKS	

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD tahun Sebelumnya

   Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional tahun 2024 berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota tahun 2022, maka Kabupaten Hulu Sungai tengah Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3,0887 dan status kinerja sedang.

2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

   Berdasarkan Laporan Nomor 5.B/LHP/XIX.BJM/05/2024 Kabupaten Hulu Sungai Tengah berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2022, yang berarti posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah per 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.700.811.043.180,00**	**1.656.040.948.373,64**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**180.666.581.250,00**	**203.663.605.402,64**
1.1.1	Pajak Daerah	15.684.304.000,00	16.681.812.765,00
1.1.2	Retribusi Daerah	13.600.927.250,00	12.025.534.082,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.500.000.000,00	9.137.692.478,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	143.881.350.000,00	165.818.566.077,64
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.506.419.213.000,00**	**1.446.290.696.913,00**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.376.967.961.000,00	1.317.644.853.222,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	129.451.252.000,00	128.645.843.691,00
1.3	**LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**13.725.248.930,00**	**6.086.646.058,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
2	**BELANJA DAERAH**	**2.077.858.328.865,00**	**1.706.387.088.571,00**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1.317.105.253.709,00**	**1.123.521.721.076,00**
2.1.1	Belanja Pegawai	553.165.288.674,00	521.320.119.352,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	671.808.759.996,00	526.453.360.707,25

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
2.1.4	Belanja Subsidi	1.704.025.000,00	388.104.230,75
2.1.5	Belanja Hibah	68.486.780.039,00	56.746.986.786,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	21.940.400.000,00	18.613.150.000,00
2.2	**BELANJA MODAL**	**464.986.901.127,00**	**405.708.454.525,00**
2.2.1	Belanja Tanah	7.600.000.000,00	1.748.178.600,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	100.505.202.612,00	95.512.300.172,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	229.865.067.451,00	210.642.332.515,49
2.2.4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	126.207.319.064,00	97.218.359.646,51
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	609.312.000,00	587.283.591,00
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**57.085.287.204,00**	**593.586.332,00**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	57.085.287.204,00	593.586.332,00
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**238.680.886.825,00**	**176.563.326.638,00**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.928.523.125,00	2.547.308.000,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	235.752.363.700,00	174.016.018.638,00
	SURPLUS/ (DEFISIT)	**(377.047.285.685,00)**	**(50.346.140.197,36)**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**376.146.725.685,00**	**366.481.069.201,67**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	376.146.725.685,00	366.480.708.065,67
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	361.136,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**376.146.725.685,00**	**366.481.069.201,67**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(900.560.000,00)**	**316.134.929.004,31**

5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

NO.	NAMA INOVASI	JENIS INOVASI	INSTANSI
1.	Diang Baungah (Dashboard Digitalisasi Pendidikan Kab. HST)	Digital	Dinas Pendidikan
2.	Barakat Ceting (Bersama Masyarakat Cegah Tuntas Stunting)	Non-Digital	Kecamatan Batu Benawa
3.	Iman Sehati (Aplikasi Pemantauan Deteksi Ibu Hamil Resiko Tinggi)	Digital	Dinas Kesehatan
4.	Tarang Bulan (Pelayanan Antar Pulang dan Jemput Ambulan)	Non-Digital	RSUD Damanhuri Barabai
5.	SIAP Insulin (Notifikasi Alat Pengingat Insulin)	Digital	RSUD Damanhuri Barabai
6.	Integrasi Layanan Primer (ILP)	Digital	Dinas Kesehatan
7.	Program Kandidat Sekolah Rujukan (KSRG)	Digital	Dinas Pendidikan
8.	Sistem Pelayanan Administrasi Kecamatan (SI PA CAMAT)	Digital	Kec. Labuan Amas Selatan
9.	Rusun (Ruang Istirahat Penunggu Pasien)	Non-Digital	RSUD H. Damanhuri Barabai
10.	Baturai (Bincang Santai RSHD Barabai)	Digital	RSUD H. Damanhuri Barabai
11.	Kopi Online (Konsultasi Psikolog Online)	Non-Digital	RSUD H. Damanhuri Barabai
12.	Yasien (Pelayanan Kerohanian Pasien)	Non-Digital	RSUD H. Damanhuri Barabai
13.	MIA (Murakata Innovation Award)	Non-Digital	Bappelitbangda Kab. HST
14.	Intervensi Kemiskinan Eksrim Bidang Perikanan (Invasi Ikan)	Non-Digital	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
15.	Beri Asupan Pangan Bergizi Untuk Siswa (Bangun Tunas)	Non-Digital	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
16.	Gerakan B2SA Untuk Hulu Sungai Tengah (Gerakan SATU HST)	Non-Digital	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
17.	Penggunaan Geospatial Intelligence (GEOINT) untuk Pemetaan Tanah dan Kawasan Kumuh	Digital	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
18.	Solusi Masuk Sinyal (SIMUNAL)	Digital	Dinas Komunikasi dan Informatika
19.	Sistem Informasi Pelayanan Imunisasi Kita (Si Pelita)	Digital	Puskesmas Ilung
20.	Media Informasi Promosi Kesehatan Terintegrasi (DIMAS SAKTI)	Digital	Pukesmas Batu Tangga
21.	Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Jasa Kontruksi (SINGASAKTI)	Digitral	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22.	Unit Reaksi Cepat Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Non-Digital	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
23.	KUDA GEPANG (Penjangkauan dan Gerakan Pendampingan Korban Kekerasaan Terhadap Anak dan Perempuan)	Non-Digital	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24.	BERAS KETAN (Bersama berantas kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan)	Non-Digital	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25.	TUGUL (Bantuan Sagan Urang Lansia)	Non-Digital	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26.	MANIS (Mandampingi Masyarakat Miskin di Rumas Sakit)	Non-Digital	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
27.	BUNGAS (Bantuan Urang Disabilitas)	Non-Digital	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana,

			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28.	BULAN SABIT (Bantuan Lansia, Disabilitas Fisik dan Disabilitas Mental)	Non-Digital	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29.	BAPER YAKIN (Bantuan Permakaman untuk Yatim dan Santri Miskin)	Non-Digital	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak